

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 92 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sinergitas Kinerja Kecamatan serta untuk mendorong kreativitas dan inovasi perangkat pemerintah di wilayah kecamatan perlu dilakukan verifikasi data dan penilaian berdasarkan indikator-indikator tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 67 Seri D.44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Menunjang Akselerasi Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Menunjang Akselerasi Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Tahun 2010;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang.
6. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disebut penilaian kinerja kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di daerah kerjanya.
7. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran sinergitas kinerja kecamatan.

BAB II

PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Untuk mengukur kinerja Kecamatan dilaksanakan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan.
- (2) Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada perhitungan indikator-indikator tertentu.
- (3) Penghitungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menentukan kinerja Pemerintah Kecamatan menurut skala interval, bobot dan jumlahnya.

BAB III

SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

Pasal 3

Indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan meliputi :

- a. faktor organisasi;
- b. faktor sarana dan prasarana

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan didasarkan kepada Tipologi masing-masing Kecamatan.
- (2) Tata cara penghitungan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Hasil penghitungan Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terhadap pegawai pada Pemerintah Kecamatan yang berprestasi.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

Kecamatan yang mendapatkan hasil penilaian kinerja pemerintahan terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang berupa :

- a. Piagam Penghargaan;
- b. Piala;
- c. Pataka;
- d. Uang Pembinaan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya untuk melaksanakan kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sewaktu-waktu akan berubah disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan Kecamatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 92

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 92 Tahun 2009
 Tanggal : 29 September 2009
 Tentang : PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
 TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

I. SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

A. Faktor Organisasi.

1. Aspek Administrasi.

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Database dan Perencanaan Kegiatan, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a.	Tersedia Monografi Kecamatan			
	b.	Tersedia Monografi yang aktual datanya			
	c.	Tersedia RUTR Kecamatan			
	d.	Telah tersusun Renstra Kecamatan			
	e.	Telah tersusun rencana kinerja tahunan (Penjabaran Renstra)			
	f.	Tersedia Database Kepegawaian Kecamatan			
	g.	Tersedia dan terisi lengkap data aset Kecamatan			
	h.	Tersedia data hasil Musrenbang Kecamatan			
		5 – 4 Kriteria		5	2
	6 – 7 Kriteria		7	2	
	8 Kriteria		10	2	
2	Pelaporan Kegiatan (LAKIP), dengan kriteria sebagai berikut :				
	a.	Mengisi buku harian dan laporan harian Camat			
	b.	Membuat secara rutin LAKIP per triwulan			
	c.	Membuat secara rutin Laporan Rapat Muspika			
	d.	Membuat Laporan Kegiatan Tahunan			
		2 Kriteria		5	2
	3 Kriteria		7	2	
	4 Kriteria		10	2	
3	Kemampuan pengelolaan kearsipan, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a.	Tersedia pedoman aturan kearsipan dan tata naskah			
	b.	Tersedia tempat khusus/lemari penyimpanan arsip			
	c.	Pemisahan secara apik antara arsip aktif dan arsip in aktif			
	d.	Tersedia petugas khusus yang menangani kearsipan			
	e.	Paham dan terampil dalam mengelola arsip			
		1 – 2 Kriteria		5	2
	3 – 4 Kriteria		7	2	
	5 Kriteria		10	2	

2. Aspek Koordinasi

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Mekanisme/Prosedur tetap tentang hubungan kerja, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a.	Ada Peraturan Camat yang mengatur hubungan kerja instansi lain di Kecamatan			
	b.	Ada kegiatan diseminasi aturan prosedur tetap bagi seluruh instansi di Kecamatan			
	c.	Tidak terjadi duplikasi pekerjaan dengan instansi lain di Kecamatan			
	d.	Terbaginya seluruh tugas dan kewajiban serta wewenang Kecamatan ke dalam seluruh rincian tugas pokok dan fungsi instansi lain di Kecamatan			
		2 Kriteria		5	1,5
	3 Kriteria		7	1,5	
	4 Kriteria		10	1,5	

1	2	3	4	5	6
2	Terlaksananya kegiatan forum koordinasi secara rutin, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada jadwal rutin rapat minggon				
	b. Ada bahan/pointer rapat koordinasi				
	c. Ada daftar hadir dan notulen				
	d. Ada evaluasi kehadiran				
	2 Kriteria		5	1,5	
	3 Kriteria		7	1,5	
4 Kriteria		10	1,5		
3	Tingkat kehadiran dan frekuensi dalam pelaksanaan rapat koordinasi				
	< 60 %		5	1,5	
	60 % – 80 %		7	1,5	
	> 80 %		10	1,5	
4	Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi tingkat Kabupaten, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada data/informasi kegiatan SKPD Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan				
	b. Ada pelibatan /partisipasi dalam memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan instansi tingkat Kabupaten di Kecamatan				
	c. Menghindari perselisihan kerja dengan instansi tingkat Kabupaten mengenai kegiatan yang dilakukan di Kecamatan				
	d. Mengupayakan dengan serius untuk mengikuti rapat kerja di tingkat Kabupaten				
	2 Kriteria		5	1,5	
	3 Kriteria		7	1,5	
4 Kriteria		10	1,5		

3. Aspek Pembinaan Pemerintahan Desa

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				
	b. Ada jadwal kegiatan pembinaan				
	c. Ada berita acara hasil pembinaan				
	d. Melakukan teguran terhadap Kepala Desa/Perangkat Desa yang berperilaku indisipliner/kinerja rendah				
	e. Terselesaikan perselisihan antara Pemerintah Desa dengan BPD				
	1 – 2 Kriteria		5	1,5	
3 – 4 Kriteria		7	1,5		
5 Kriteria		10	1,5		
2	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD), dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Fasilitasi ADD				
	b. Ada jadwal pembinaan pengelolaan ADD				
	c. Ada Surat Pengantar usulan ADD				
	d. LKPJ Kepala Desa				
	e. Daftar rencana kegiatan				
	f. Daftar usulan kebutuhan per tahap				
	g. Berita acara musyawarah ADD				
	h. Ada laporan realisasi kegiatan ADD				
	1 – 3 Kriteria		5	1,5	
4 – 7 Kriteria		7	1,5		
8 Kriteria		10	1,5		

1	2	3	4	5
3	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, dengan kriteria sebagai berikut :			
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Fasilitasi/ Pembinaan Pemilihan Kepala Desa			
	b. Ada jadwal pembinaan Panitia Pilkades			
	c. Tidak terjadi konflik Pilkades			
	d. Dapat teratasi permasalahan Pilkades			
	e. Ada administrasi pelaporan hasil Pilkades			
	1 – 2 Kriteria	5	1,5	
	3 – 4 Kriteria	7	1,5	
	5 Kriteria	10	1,5	

4. Aspek Pelayanan Publik

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitas pendukung pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Terdapat tempat khusus pelayanan publik				
	b. Tersedia ruang tunggu				
	c. Terdapat data visualisasi tentang jenis-jenis pelayanan publik				
	d. Terdapat data visualisasi mekanisme pelayanan publik				
	e. Tersedia petugas unit pengaduan atau kotak pengaduan				
	f. Tersedia sarana komputer, mesin tik dan format formulir yang khusus memberikan pelayanan publik				
	1 – 2 Kriteria	5	3		
	3 – 5 Kriteria	7	3		
	6 Kriteria	10	3		
2	Kapasitas petugas pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
	b. Tersedia aturan tentang prosedur pelayanan publik				
	c. Pelaksanaan sosialisasi aturan prosedur pelayanan publik				
	d. Terpenuhi aturan prosedur pelayanan publik				
	1 Kriteria	5	3		
	2 – 3 Kriteria	7	3		
	4 Kriteria	10	3		
3	Kinerja pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Indeks pelayanan				
	b. Rata-rata ketepatan waktu dapat dicapai				
	c. Tarif pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Daerah				
	d. Ketelitian hasil pekerjaan				
	e. Frekuensi pengaduan pelayanan publik				
	1 – 2 Kriteria	5	3		
	3 – 4 Kriteria	7	3		
	5 Kriteria	10	3		

5. Aspek Kegiatan Inovasi.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				
	1 Kegiatan	5	3		
	2 Kegiatan	7	3		
	3 atau lebih Kegiatan	10	3		

6. Aspek Pendidikan

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah anak usia 2 – 3 Tahun yang terlayani dalam kegiatan PAUD				
	< 35 %		5	2	
	≥ 35 – 65 %		7	2	
	> 65 %		10	2	
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun yang terlayani dalam kegiatan TK/RA				
	< 10 %		5	2	
	≥ 10 – 20 %		7	2	
	> 20 %		10	2	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat				
	< 80 %		5	2	
	≥ 80 – 100 %		7	2	
	> 100 %		10	2	
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat				
	< 75 %		5	2	
	≥ 75 – 90 %		7	2	
	> 90 %		10	2	
5	Angka melanjutkan lulusan SD/Sederajat				
	< 80 %		5	2	
	≥ 80 – 100 %		7	2	
	> 100 %		10	2	
6	Angka melanjutkan lulusan SMP/Sederajat				
	< 50 %		5	2	
	≥ 50 – 75 %		7	2	
	> 75 %		10	2	
7	Rata-rata rasio guru dan murid SD/Sederajat				
	1 : > 44		5	2	
	1 : > 44 – 40		7	2	
	1 : ≤ 40		10	2	
8	Rata-rata rasio guru dan murid SMP/Sederajat				
	1 : > 30		5	2	
	1 : > 30 – 28		7	2	
	1 : ≤ 28		10	2	
9	Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok 15 – 44 Tahun				
	> 20 %		5	2	
	> 20 – 7 %		7	2	
	≤ 7 %		10	2	
10	Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok diatas 45 Tahun				
	< 40 %		5	2	
	≥ 40 – 30 %		7	2	
	> 30 %		10	2	
11	Angka Putus Sekolah (APS) murid SD/Sederajat				
	> 2 %		5	2	
	> 2 – 0 %		7	2	
	≤ 0 %		10	2	
12	Angka Putus Sekolah (APS) murid SMP/Sederajat				
	> 1 %		5	2	
	> 2 – 1 %		7	2	
	≤ 2 %		10	2	

7. Aspek Kesejahteraan Sosial

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan Tim Desa Siaga Tingkat Kecamatan.				
	b. Kegiatan bantuan keluarga miskin				
	c. Terdapat data keluarga miskin yang akurat.				
	d. Terdapat data keluarga miskin secara periodik.				
	e. Terlaksana penanganan rawan pangan				
	f. Terdapat data pengangguran				
	1 – 2 Kriteria	5	2		
	3 – 4 Kriteria	7	2		
	5 – 6 Kriteria	10	2		
2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional/Lokal				
	< 3 kali penyelenggaraan		5	2	
	4 – 6 kali penyelenggaraan		7	2	
	< kali penyelenggaraan		10	2	

8. Aspek Kesehatan

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Rumah tangga sehat				
	< 25 %		5	2	
	50 – 75 %		7	2	
	> 75 – 90 %		10	2	
2	Posyandu Purnama				
	< 15 %		5	2	
	15 – 35 %		7	2	
	> 35 %		10	2	
3	Cakupan kunjungan ibu hamil ke 4				
	< 20 %		5	2	
	20 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi				
	< 40 %		5	2	
	40 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
5	Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk				
	< 40 %		5	2	
	40 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
6	Cakupan rawat jalan di Puskesmas				
	< 30 %		5	2	
	30 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
7	Angka Harapan Hidup (AHH)				
	< 60 Tahun		5	2	
	60 – 75 Tahun		7	2	
	> 75 Tahun		10	2	
8	Pengguna air bersih				
	< 40 %		5	2	
	40 – 80 %		7	2	
	> 80 %		10	2	

9. Aspek Ekonomi

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase kenaikan PDRB				
	< 2 %		5	2	
	2 – 5 %		7	2	
	> 5 %		10	2	
2	Prosentase kenaikan jumlah pelaku usaha mikro. Kecil, menengah dan koperasi yang menerima penyaluran kredit dari bank/non bank				
	< 2 %		5	2	
	2 – 5 %		7	2	
	> 5 %		10	2	
3	Realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan				
	< 70 %		5	2	
	70 – 90 %		7	2	
	> 90 %		10	2	

10. Aspek Ketentraman dan Ketertiban

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kriminalitas				
	< 15 Kasus per tahun		5	1	
	7 – 15 Kasus per tahun		7	1	
	> 7 Kasus per tahun		10	1	
2	Penanggulangan bencana dan sosialisasi, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Terdapat peta rawan bencana alam dan sosial				
	b. Rencana tindak penanggulangan bencana pada Unit Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan				
	c. Tersedia sarana dan pra sarana kegiatan Satkorlak Penanggulangan bencana Kecamatan.				
	d. Terlaksana rapat-rapat evaluasi pengkajian kondisi dan potensi bencana setiap tahunnya.				
	e. Terjalinnnya kerjasama dengan institusi/organisasi lain				
	f. Terdapat data pengangguran				
	1 – 2 Kriteria		5	1	
	3 – 4 Kriteria		7	1	
> 5 Kriteria		10	1		

11. Aspek Hukum

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Indeks produk hukum Kecamatan dalam satu tahun				
	4. Produk hukum		5	1	
	4 – 6 Produk hukum		7	1	
	> 6 Kasus per tahun		10	1	
2	Sosialisasi peraturan/implementasi perundang-undangan, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemerintah.				
	b. Melakukan kegiatan sosialisasi Unit Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan				
	c. Adanya Keputusan/SP				
	d. Adanya Desa Sadar hukum				
	1 – 2 tahun		5	1	
	3 – 4 Kriteria		7	1	
	> 5 Kriteria		10	1	

B. Faktor Sarana dan Pra Sarana Kantor

1. Aspek Penataan Ruang

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Sarana dalam kantor				
	a.	Terdapat ruangan khusus untuk para pejabat struktural sekurang-kurangnya 4 ruangan			
	b.	Terpenuhinya seluruh pegawai untuk memiliki meja dan kursi kerja sesuai dengan jumlah pegawai			
	c.	Terdapat ruangan rapat yang terpisah dengan ruangan kerja			
	d.	Terdapat ruangan khusus penyimpanan barang/ gudang arsip in aktif dll.			
	e.	Memiliki ruang/tempat khusus untuk komputer/siak			
	f.	penataan ruangan yang rapih, bersih dan apik			
		2 Kriteria		5	2,5
	3 – 5 Kriteria		7	2,5	
	6 Kriteria		10	2,5	
2	Ruangan Rapat				
	a.	Terdapat gambar Presiden dan Wakil Presiden			
	b.	Terdapat lambang Burung Garuda			
	c.	Terdapat meja dan kursi pimpinan rapat sekurang-kurangnya bisa menampung 3 orang			
	d.	Terdapat kursi rapat sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pegawai yang ada di Kecamatan yang bersangkutan.			
	e.	Terdapat papan nama ruangan rapat			
	f.	Ruangan terpelihara dengan baik, rapih dan bersih			
		2 Kriteria		5	2,5
	3 – 5 Kriteria		7	2,5	
	6 Kriteria		10	2,5	
3	Tempat / ruangan pelayanan				
	a.	Terdapat tempat duduk dan meja untuk para tamu yang ingin memperoleh pelayanan			
	b.	Terdapat papan nama ruangan tunggu			
	c.	Terdapat air minum / dispenser			
	d.	Terdapat buku pengunjuk/ tamu			
	e.	Terdapat surat kabar/ majalah			
	f.	Ruangan terawat dan terpelihara dengan baik, rapih dan bersih.			
		2 Kriteria		5	2,5
	3 – 5 Kriteria		7	2,5	
	6 Kriteria		10	2,5	
4	WC				
	a.	Terdapat fasilitas air bersih			
	b.	Terdapat gayung			
	c.	Terdapat sabun mandi			
	d.	Terdapat kastop/ gantungan pakaian/ handuk dll.			
	e.	Terdapat pemisahan antara WC laki-laki dan perempuan			
	f.	terpelihara dan terawat dengan baik, rapih dan bersih			
		1 – 2 Kriteria		5	2,5
	3 – 4 Kriteria		7	2,5	
	5 – 7 Kriteria		10	2,5	
5	Sarana Komunikasi/ Transportasi/ Informasi				
	a.	Memiliki kendaraan roda empat sekurang-kurangnya satu buah			
	b.	Memiliki kendaraan roda dua sekurang-kurangnya dua buah			
	c.	Terdapat pesawat televisi			
	d.	Memiliki pesawat telephone/ komunikasi			
	e.	Terdapat tempat penyimpanan surat kabar			
	f.	Pesawat telephone tidak dalam terisolir			
		2 Kriteria		5	2,5
	3 – 5 Kriteria		7	2,5	
	6 Kriteria		10	2,5	

1	2	3	4	5
6	Sarana halaman kantor			
	a. Memiliki halaman parkir mobil dan motor			
	b. Memiliki taman yang ditata dengan baik			
	c. Terdapat minimal 2 pohon hidup yang berusia sekurang-kurangnya satu tahun			
	d. Terdapat identitas / petunjuk yang jelas untuk parkir motor dan parkir mobil			
	e. Memiliki tempat berteduh untuk tempat parkir motor			
	f. Terlihat secara jelas adanya pemeliharaan halaman kantor secara rutin			
	g. Terpelihara dan terawat dengan baik, rapih dan bersih			
	1 – 2 Kriteria	5	2,5	
	3 – 4 Kriteria	7	2,5	
	5 – 7 Kriteria	10	2,5	

2. Aspek Visualisasi Data

No	INDIKATOR	NILAI (✓/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Visualisasi Data Umum				
	a. Terdapat rencana Kinerja Tahunan, tahun yang sedang berjalan dan terpasang pada tempat yang bisa dibaca oleh umum				
	b. Terdapat daftar aspirasi masyarakat yang terpampang dan bisa dibaca oleh masyarakat				
	c. Terdapat daftar kegiatan tahun ini yang bersumber dari APBD untuk se-wilayah Kecamatan				
	d. Terdapat data realisasi aspirasi yang telah diupayakan oleh Kecamatan				
	e. Terdapat Piagam penghargaan dan piala sebagai identitas prestasi Kecamatan				
	f. Terdapat daftar target dan realisasi PBB, HO, IMB dan lain-lain				
	2 Kriteria		5	2,5	
	3 – 5 Kriteria		7	2,5	
	6 Kriteria		10	2,5	

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO